

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Histori terciptanya Badan Pemeriksa Finansial dimulai saat berdirinya Pada tanggal 14 Desember 1949, Republik Indonesia Serikat (RIS) membentuk Dewan Pengawas Finansial (DPK) Republik Indonesia Serikat berlandaskan prasasti Konstitusi RIS. DPK RIS di Bogor menguasai bekas biro Algemene Reckamer semasa Penguasaan Sipil Hindia Belanda (NICA). Kemudian Pada tanggal 17 Agustus 1950, DPK RIS yang telah berada di Bogor sejak 1 Oktober 1950 dilebur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan BPK. Kemudian mengambil alih bekas kantor DPK RIS di Bogor. Staf DPK RIS tiba dari BPK Pratama di Yogyakarta dan Bogor. Pada tanggal 5 Juli 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia mengeluarkan proklamasi yang mengatur tentang pengesahan kembali UUD 1945.

BPK ini merupakan institusi penguasa yang mengevaluasi administrasi yang bebas dan mandiri serta pertanggungjawaban finansial negara menurut hukum, status BPK tersistem pada Pasal 23E dan 23G UUD 1945, yang meletakkan BPK sebagai institusi penguasa dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA dan MK pada konstitusi IndonesiaUU No.15 Tahun 2006 tentang BPK semakin mempertegas status BPK sebagai pemeriksa finansial negara yang bebas dan independen. BPK merupakan salah satu institusi nasional yang berperan strategis dalam mendorong penguasa untuk memmanifestasikan kebijakan dan strategi penyusunan. Melalui kegiatan audit, BPK mengawasi dan merencanakan untuk memprioritaskan rencana penyusunan nasional, melaporkan menentukan transparan dan bertanggung jawab, dan meningkatkan keselamatan publik Indonesia, tata kelola penguasa pusat dan daerah, dan perbaikan keinstitusian.

Sementara itu, Cabang BPK Provinsi DKI Jakarta sendiri merupakan salah satu BPK penyelenggara yang ditetapkan Provinsi DKI Jakarta sebagai pengemban amanat konstitusi, sangat memdampaki stakeholders termasuk

Cabang instansi, penguasa, dan masyarakat. Bahkan Cabang BPK di Provinsi DKI Jakarta kerap menjadi bahan pemberitaan media nasional. Situasi ini menuntut agar keluaran audit berupa laporan temuan audit bermutu tinggi dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Ringkasnya, mutu review di kantor Cabang BPK DKI Jakarta patut konstan berbenah. Nilai-nilai dasar loyalitas, kemandirian, dan profesionalisme BPK patut dijaga dan diperkuat. Sistem pengoperasian mutu BPK di tingkat audit dan keinstitusian juga patut diperkuat.

Pembentukan dan Pengoperasian Badan Pemeriksa Finansial Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Reinstitusi dan Pengoperasian Badan Pemeriksa Finansial sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK No. 1 / K/I-XIII.2/2/2016 Keputusan Auditor Jenderal BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Merupakan bagian dari aplikasi BPK yang bertanggung jawab atas auditor.

Kepala Kantor Cabang BPK Provinsi DKI Jakarta di Kantor Wilayah Provinsi Jakarta dan bertanggung jawab kepada Penguasa Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan instansi terpaut dalam institusi tersebut, termasuk melakukan pengecekan alokasi AKN.

Cabang BPK Provinsi DKI Jakarta juga berencana menjajaki fokus audit daerah, khususnya pada isu-isu strategis di DK Jakarta yaitu:

1. Pengujian Kinerja dan PDTT terpaut Program Pengembangan Prasarana dan Utilitas Transportasi DKI Jakarta;
2. Pengujian kinerja dan PDTT terpaut program pengoperasian banjir di DKI Jakarta;
3. Audit kinerja dan PDTT terpaut pengelolaan aset tetap, kompensasi pengembang dan utilitas sosial dan publik;
4. Pengujian kinerja dan PDTT terpaut administrasi BUMD; dan
5. Pengujian kinerja dan PDTT terpaut program pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi dan perumahan

Dalam kegiatan operasional BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta sebagai institusi auditor, dibantu oleh beberapa kegiatan operasional penunjang. Salah satunya merupakan Subkomite Administrasi menjalankan fungsi sekretaris

dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan. Adapun jumlah pegawai dari Sub Bagian Tata Usaha saat ini mampu disaksikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1. Data Pegawai di Sub Bagian Tata Usaha BPK Cabang  
Provinsi DKI Jakarta**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Subbagian TU Kepala Cabang	1
2	Sekretaris	3
3	Pengadministrasian Umum	4
	<b>Total</b>	<b>8</b>

Menyadari pentingnya arti dan peran pegawai dalam suatu institusi termasuk di Sub Bagian Tata Usaha BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta, maka pegawai perlu dikelola dengan baik agar mau memmanifestasikan sistem tata kerja dengan baik. Adanya sistematis, kerja dan proses yang sistematis dan bertanggung jawab, dinantikan semua implementasi kebijakan mampu berjalan dengan lancar, yang hingga akhirnya akan berefek pada mutu jasa auditor.

Selain sistem tata kerja, Tradisi Institusi juga patut ditanamkan kepada seluruh pegawai dan khususnya Sub Bagian Tata Usaha dengan baik, sehingga Tradisi Institusi mampu memberikan kontribusi positif atas BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Dengan adanya Tradisi institusi yang dibentuk dan dikembangkan di lingkungan BPK maka akan terbentuk komunitas Tradisi institusi BPK sebagai bentuk cara dari visi, misi dan kaidah-kaidah fundamental BPK. Hal ini menjadi bagian dari dukungan dan modal institusi BPK untuk memastikan proses internal BPK (seperti penegakan kebijakan yang telah ditetapkan) berjalan dengan lancar, dan berakhir dengan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan auditor.

Sesuai penelitian yang dilakukan penulis, ada 112 pegawai Auditor yang patut dilayani oleh Sub Bagian Tata Usaha BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta. Berikut data detilnya mampu disaksikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.2. Data Pegawai Auditor BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta**

No.	Uraian	Jumlah
1	Kasub Aud	4
2	Auditor Sub Aud DKI 1	27
3	Auditor Sub Aud DKI 2	29
4	Auditor Sub Aud DKI 3	26
5	Auditor Sub Aud DKI 4	26
	<b>Total</b>	<b>112</b>

Sesuai Tabel 1.2 menentukan bahwa dari 112 pegawai auditor mampu diperinci lagi menjadi Kasub Aud ada 4 orang, dan sisanya Auditor Sub Aud DKI sebanyak 108 orang pegawai.

Persoalan Tradisi institusi di area administrasi balai cabang BPK Provinsi DKI Jakarta muncul dari kuatnya tuntutan reformasi birokrasi yang dirasakan oleh pegawai yang tidak sepenuhnya menyadari kesadaran diri mereka. Mengelola kantor Cabang Provinsi DKI Jakarta untuk mengubah pola pikir dan Tradisi institusi mereka. Persepsi ini merupakan kunci untuk mengubah dirinya sendiri. Dengan pemahaman ini, seseorang menyesuaikan prioritasnya dan Tradisi berpikir dan institusi berubah sedikit banyak untuk mengikuti perubahan ritme pekerja.

Berbagai persoalan Tradisi Institusi yang dihadapi Sub Bagian Tata Usaha BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta antara lain :

1. Pengoperasian wewenang dan Tanggung jawab karyawan saat ini kurang lebih seimbang, banyak karyawan yang memiliki kejujuran, integritas dan profesionalisme sudah baik, hanya patut lebih ditingkatkan lagi,
2. Jumlah pegawai yang masih sedikit, *skill* serta sistem tata kerja dari pegawai yang belum sepenuhnya sesuai dengan jenis pekerjaan sehingga membuat pekerjaan untuk setiap orang akan berbeda dan berganda.
3. Para pemimpin akan melakukan cek dan ricek saat ada suatu yang kurang tepat atau kurang pas di depan bawahan, dan pimpinan lebih memahami makna keadilan dan transparansi.

Cabang BPK Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu penyelenggara BPK yang ditunjuk oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai pengemban amanat konstitusi. Selanjutnya sebagai ibu kota negara, provinsi memiliki pengalaman ketika pemeliharaan finansial penguasa daerah, yang berdampak besar bagi pemangku kepentingan, penguasa, dan masyarakat. Bahkan beberapa hasil ujian DPR Provinsi DKI Jakarta kerap menjadi bahan pemberitaan media nasional. Situasi ini menuntut penyediaan output audit berupa laporan temuan audit yang bermutu tinggi dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Ringkasnya, mutu ujian BPK cabang Provinsi DKI Jakarta mesti selalu bertambah. Nilai-nilai dasar loyalitas, kemandirian, dan profesionalisme BPK patut dijaga dan diperkuat. Pola pengaturan mutu BPK di derajat audit dan institusi juga mesti diteguhkan.

Sistem kerja dan proses yang sistematis, teratur dan bertanggung jawab, memastikan alur kerja yang konsisten dan sangat sistematis, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antar unit kerja, memungkinkan mereka untuk menerapkan semua kebijakan yang telah diidentifikasi dan menciptakan layanan prima kepada auditor. Sedangkan Tradisi Institusi mampu memotivasi pegawai guna memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh institusi. Nilai-nilai serempak menjadikan karyawan merasa senang dalam bekerja, merasa bertanggung jawab dan jujur serta menjadikan karyawan bekerja lebih giat, memajukan mutu layanan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Oleh karenanya suatu institusi membutuhkan Tradisi institusi yang tangguh untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.

Sesuai latar belakang persoalan dan peristiwa di atas, maka peneliti terpicat untuk mengkaji pada rupa kajian dengan mengambil judul Dampak Sistem Tata Kerja Dan Tradisi Institusi Atas Pelayanan Prima Kepada Auditor BPK Melalui Implementasi Kebijakan (Studi Kasus Pada BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta Sub Bagian Tata Usaha).

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Sesuai dengan pendahuluan di atas, kajian ini memiliki permasalahan berikut ini :

1. Apakah Sistem Tata Kerja berdampak menentukan langsung atas Implementasi Kebijakan di BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah Tradisi Institusi berdampak menentukan langsung atas Implementasi Kebijakan di BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah Sistem Tata Kerja berdampak menentukan langsung atas Pelayanan Prima Kepada Auditor BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah Tradisi institusi berdampak menentukan langsung atas Pelayanan Prima Kepada Auditor BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta?
5. Apakah Implementasi Kebijakan berdampak menentukan langsung atas Pelayanan Prima Kepada Auditor BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai ringkasan persoalan di atas, maka tujuan dari ini merupakan :

1. Guna memahami dampak Sistem Tata Kerja menentukan langsung atas Implementasi Kebijakan di BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta.
2. Guna mengetahui dampak Tradisi Institusi menentukan langsung atas Implementasi Kebijakan di BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta.
3. Guna mengetahui dampak Sistem Tata Kerja menentukan langsung atas Pelayanan Prima Kepada Auditor BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta.
4. Guna mengetahui dampak Tradisi Institusi menentukan langsung atas Pelayanan Prima Kepada Auditor BPK Cabang Provinsi DKI Jakarta.
5. Memahami dampak langsung penerapan kebijakan atas mutu layanan yang diberikan oleh auditor Cabang BPK di Provinsi DKI Jakarta?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diperlukan dari penelitian ini merupakan sebagai berikut:

##### **1. Bagi peneliti**

Efek kajian ini diinginkan meninggalkan deskripsi dan apresiasi yang lebih mendalam perihal dampak sistem tata kerja dan Tradisi Institusi kepada pelayanan prima baik menentukan langsung maupun tidak langsung melalui Implementasi Kebijakan, serta sebagai tumpuan bagi kajian yang sejenis di masa depan.

##### **2. Bagi Akademis**

Efek penelitian diinginkan menjelma tumpuan yang baik ketika menumbuhkan kajian berikutnya dan selaku menjadi tuntunan untuk menambah pengetahuan ilmiah.

##### **3. Bagi Institusi BPK Cabang DKI Jakarta**

Kajian ini dinantikan mampu berguna dalam pengambilan keputusan mengenai membangun sistem tata kerja yang baik serta Tradisi Institusi yang kuat kepada para pegawainya sehingga mampu membentuk Implementasi Kebijakan dan berdampak atas pelayanan prima kepada Auditor.